

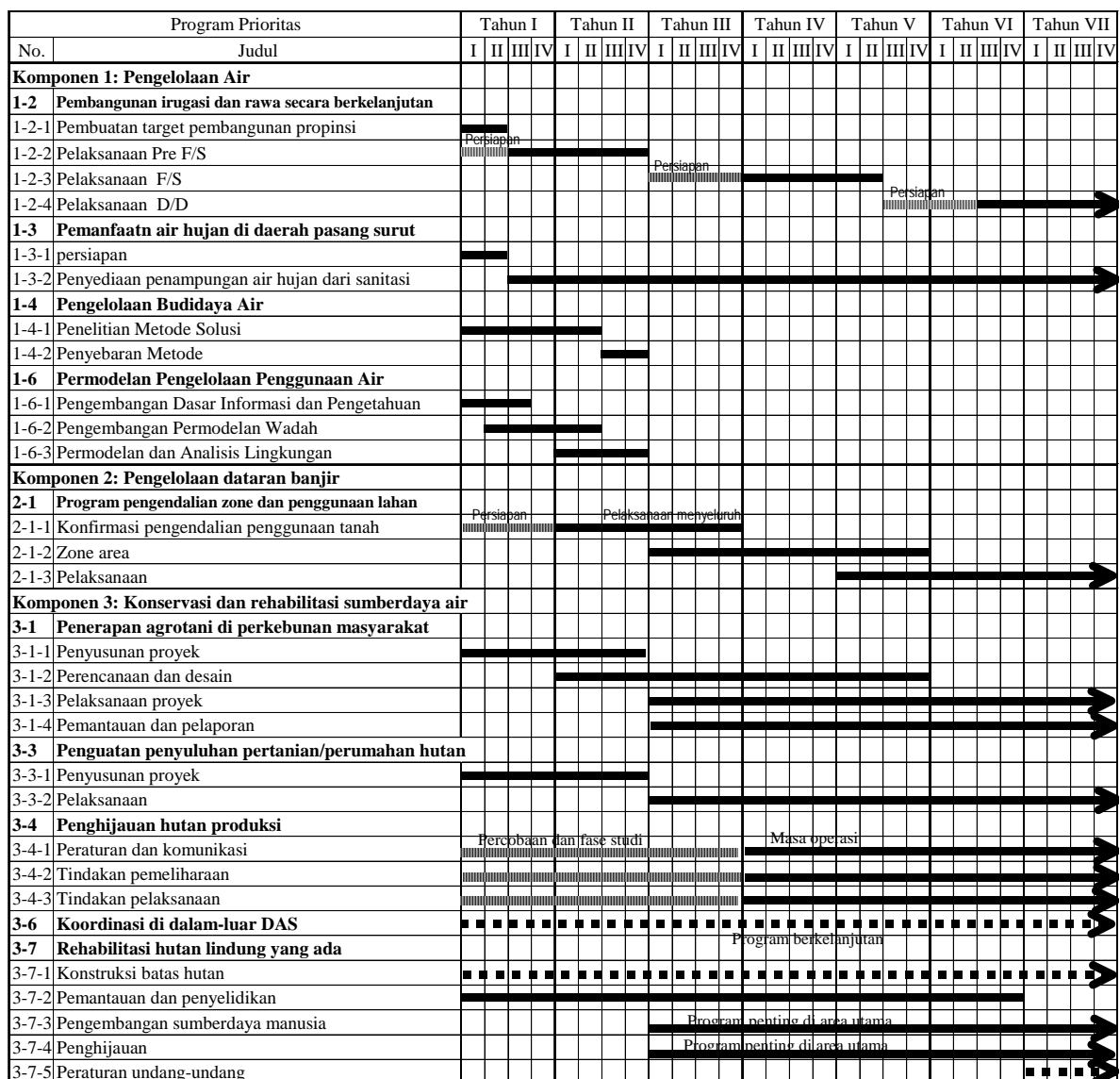
BAB 8

**PELAKSANAAN RENCANA, PERKIRAAN BIAYA DAN
 EVALUASI PROYEK UNTUK PROGRAM PRIORITAS**

8.1 Pelaksanaan Rencana

8.1.1 Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan untuk program yang prioritas telah dipersiapkan pemikiran pelaksanaan rencana program tiap komponen dan hubungan antara program tiap komponen.



Gambar 8.1.1 (1/2) Jadwal Pelaksanaan

Program Prioritas		Tahun I				Tahun II				Tahun III				Tahun IV				Tahun V				Tahun VI				Tahun VII			
No.	Judul	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Komponen 4: Peningkatan Lingkungan Air Perkotaan																													
4-1 Pengelolaan drainase masyarakat																													
4-1-1	Model proyek																												
4-1-2	Pemantauan proyek yang lalu																												
4-1-3	Standar pelaksanaan																												
4-3 Rehabilitasi saluran drainase air																													
4-3-1	Pembuatan sistem rehabilitasi																												
4-3-2	Rehabilitasi saluran peti																												
Komponen 5: Pembuatan jaringan pemantauan																													
5-1 Pembuatan sistem pemantauan hidrologi																													
5-1-1	Survei persediaan																												
5-1-2	Pendirian organisasi dan pengelolaan																												
5-1-3	Kapasitas bangunan																												
5-1-4	Konstruksi baru dan peningkatan fasilitas																												
5-1-5	Pemantauan																												
5-2 Pembuatan sistem pemantauan kualitas air																													
5-2-1	Koordinasi antara badan yang terkait																												
5-2-2	Persiapan rencana pemantauan																												
5-2-3	Pendirian laboratorium kualitas air di balai PSDA Musi																												
5-2-4	Pemantauan																												
5-4	Pembuatan sistem data hidrologi																												
Komponen 6: Penguatan kelembagaan																													
6-2 Publikasi trans paransi hubungan masyarakat																													
6-2-3	Pengelolaan web site resmi sumberdaya air																												
6-5 Perbaikan organisasi																													
6-5-1	Pendirian unit WRDI di Balai PSDA																												
6-5-3	Pembentukan PTPA/PPTPA secepat mungkin																												
6-6 Pengembangan sumberdaya manusia																													
6-6-1	Pelatihan operator teknis untuk Balai PSDA																												
6-6-2	Pelatihan untuk perencanaan dan pengelolaan																												
6-6-3	Pelatihan untuk O&M sistem irigasi																												
6-6-4	Pelatihan bersama LSM untuk pemimpin informal																												

Gambar 8.1.1 (2/2) Jadwal Pelaksanaan

8.1.2 Organisasi Pelaksanaan dan Penugasan

Untuk pelaksanaan dari rencana pengelolaan yang diajukan, diusulkan untuk mengadakan pertemuan secara periodic yang diselenggarakan oleh BAPPEDA untuk mengevaluasi kemajuan pelaksanaan dari rencana pengelolaan yang diajukan. Dari keseluruhan, penugasan dari kunci organisasi dirangkum sebagai berikut:

- Gubernur Propinsi Sumatera Selatan: Bertanggungjawab untuk Pengelolaan Air Secara Menyeluruh Daerah Aliran Sungai Musi.
- PTPA: Membuat usulan kepada Gubernur dalam hal dideklarasikannya Peraturan Pemerintah untuk Sumberdaya Air yang baru.
- BAPPEDA: Melaksanakan koordinasi secara keseluruhan untuk pelaksanaan pengelolaan air.
- Dinas PU Pengairan: Berperan sebagai organisasi pemimpin untuk pelaksanaan pengelolaan air.
- Balai PSDA Musi: Berperan sebagai operator untuk pengelolaan air.
- Dinas Kehutanan: Berperan sebagai organisasi pemimpin dari pelaksanaan Komponen 3: Rehabilitasi dan Konservasi DAS.

- Dirjen Sumberdaya Air: Berperan sebagai organisasi pemimpin untuk pelaksanaan program nasional.

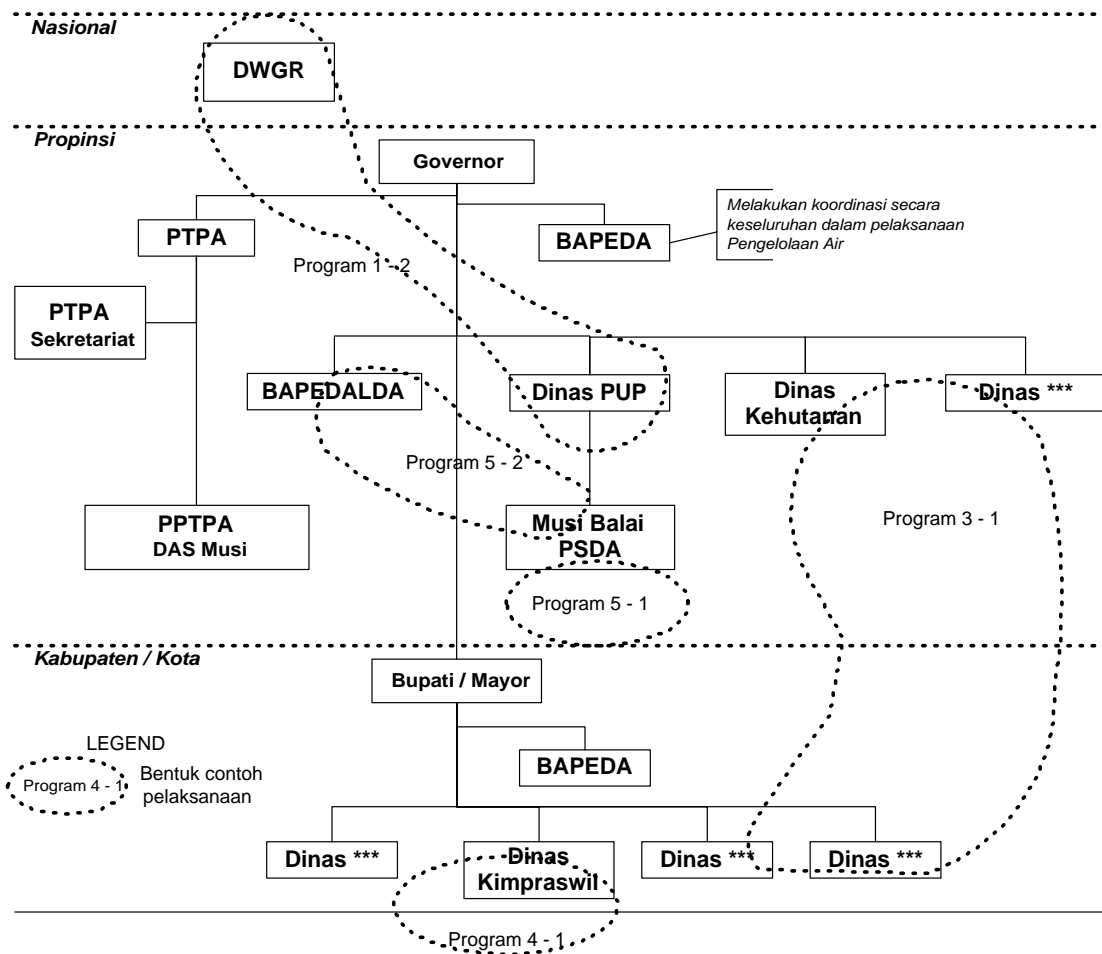
Tabel 8.1.1 menunjukkan susunan dari pelaksanaan, pendukung dan instansi terkait untuk tiap-tiap program prioritas.

Tabel 8.1.1 Pelaksanaan, Pendukung dan Instansi Terkait

Komponen dan Program	DGWR	BMG	South Sumatra Province																Private Company/setup	Community/NGOs													
			Governor's Office	BAPPEDA	Dinas PUP	Balai PSDA	Forest Service	Agriculture Service	Estate Service	Fisheries Service	UPTD	Balai KSDA	BAPEDALDA	PDAMs	Other Provinces	Kota Palembang	Kab. Muba	Kab. Banyuasin			Kab. Muara Enim	Kota Perabumulih	Kab. Lahat	Kota Pagarlalam	Kba. Mura	Kota Lubuk Linggau	Kab. Oki	Kab. Oku					
Komponen 1: Pengelolaan Penggunaan Air																																	
1-2	Pengembangan rawa dan irigasi secara berkelanjutan	A	B	B																B	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
1-3	Pemanfaatan air hujan di area rawa pasang-surut			A																	B	B							B				
1-4	Pengelolaan budi daya air			A		B	B								B	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	B			
1-6	Pembentukan pengelolaan sumberdaya air	A	C		B	C				C					B																		
Komponen 2: Pengelolaan Dataran Banjir																																	
2-1	Program pengendalian tata guna lahan dan penetapan wilayah			B	A	B	B													C	C		C	C		C							
Komponen 3: Konservasi dan Rehabilitasi Daerah Perairan Sungai																																	
3-1	Aplikasi hutan pertanian di perkebunan petani						A	B	B													B	B	B				B					
3-3	Penguatan penyuluhan pertanian /perumahan /hutan yang ada						A	B	B													B	B	B				B					
3-4	Penghijauan hutan produksi						A														B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	C		
3-6	Koordinasi bagian dalam dan antar DAS		A												B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B				
3-7	Rehabilitasi hutan lindung yang ada						B				A										B	B	B	B							C		
Komponen 4: Perbaikan Lingkungan Air Kota																																	
4-1	Pengelolaan drainase masyarakat																				A											B	
4-3	Rehabilitasi saluran drainase																				A												
Komponen 5: Pembentukan Jaringan Pemantauan																																	
5-1	Pembentukan Pemantauan Sistem Hidrologi		B			A															C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
5-2	Pembentukan Pemantauan Kualitas Air					A						B	B		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
5-4	Pembuatan Database Hidrologi		B			A						B	B																				
Komponen 6: Penguatan Kelembagaan																																	
6-2-3	Website resmi pengelolaan sumberdaya air					A																											
6-5-1	Pembentukan Unit Informasi dan Data Sumberdaya Air di Balai PSDA					A	B																										
6-5-3	Aktivitas PTPA/PPTPA			A	B										B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B				
6-6-1	Pelatihan teknis pelaksanaan bagi pegawai pemerintahan Balai PSDA					A																											
6-6-2	Pelatihan pengelolaan dan perencanaan untuk pegawai pemerintah terkait					A																											
6-6-3	Pelatihan operasi dan pemeliharaan sistem irigasi					A		B																									
6-6-4	Pelatihan bersama dengan LSM dengan tokoh masyarakat dan orang yang dipilih					A																										B	

Catatan : A: Instansi yang berwenang; B: Instansi yang mendukung; C: Instansi terkait

Gambar 8.1.2 mengilustrasikan mode yang berbeda dari pelaksanaan prioritas program. Beberapa program akan dilaksanakan dengan organisasi tunggal, dan beberapa akan dilaksanakan melalui koordinasi antara organisasi yang berbeda.



Gambar 8.1.2 Gambar Instansi Terkait untuk Pelaksanaan Program Prioritas

8.1.3 Prasyarat yang dibutuhkan

Prasyarat yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Pengelolaan Air Secara Menyeluruh Daerah Aliran Sungai Musi adalah sebagai berikut:

- Mempertahankan kebijakan desentralisasi dengan Pemerintahan Indonesia
- Pelaksanaan Undang-Undang Sumberdaya Air yang baru dan Peraturan Pemerintah yang baru tentang Pengelolaan Sumberdaya Air.

8.2 Perkiraan Biaya

Biaya untuk program prioritas telah diperkirakan. Pengeluaran tahunan ditunjukkan pada **Tabel 8.2.1**.

Tabel 8.2.1 Anggaran Tahunan untuk Program Prioritas

(Satuan : jutaan kecuali kalau tidak diperlihatkan)

Komponen dan Program		Badan Berwening	Tahun							Sesudah
			1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	
Komponen 1: Pengelolaan Sumber Air										
1-2	Pengembangan rawa dan irigasi secara berkesinambungan	DGWR	664	1,270	0	14.000	7.000	13.650	27.300	40.950
1-3	Pemanfaat Air Hujan di area rawa pasang-surut	DPUP	19.870	19.870	19.870	19.870	19.870	19.870	19.870	59.610
1-4	Pengelolaan Budi Daya Air	DPUP	36	37	6	6	6	6	6	→
1-6	Pemodelan pengelolaan fungsi air	DGWR	6.773	6,772	12	12	12	12	12	→
Komponen 2: Pengelolaan Dataran Bujur										
2-1	Program Pengendalian Tata Guna Lahan dan zonasi wilayah	DPUP	0	539	1.149	1.149	28.389	7,142	7,142	
Komponen 3: Perbaikan dan Rehabilitasi DAS										
3-1	Penerapan hutan pertanaman di perkebunan rakyat	Hutan	0	539	1.149	1.149	28.389	7,143	7,142	
3-3	Memperkuat penyuluhan budi daya pertanian /perkebunan /hutan	Hutan	-	-	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	
3-4	Penghijauan hutan produksi	Hutan	29	29	30					
3-6	Koordinasi dalam DAS dan antar DAS	Gub.	-	-	-	-	-	-	-	
3-7	Rehabilitasi hutan lindung yang ada	BKSD	319	319	1.284	1.284	1.209	1.209	7.863	
Komponen 4: Perbaikan Lingkungan Air Kota										
4-1	Pengelolaan Drainase Masyarakat	Palemb.		220	220					
4-3	Rehabilitasi Saluran Drainase Utama	Palemb.	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350	10.050
Komponen 5: Pembuatan Jaringan Pemantauan										
5-1	Pembuatan sistem pemantauan Hidrologi	BPSDA	800 5	600 98	1.148 98	98	98	98	98	→
5-2	Pembentukan sistem pemantauan kualitas Air	BPSDA		3.042	3.042	291	291	291	291	→
5-4	Pembuatan Database Hidrologi	BPSDA	100	303	125	125	125	125	125	→
Komponen 6: Penguatan Kelembagaan										
6-2-3	Website resmi pengelolaan sumber daya air	DPUP	205	72	72	72	72	72	72	→
6-5-1	Pembuatan Unit Informasi dan Data Sumber Daya Air	DPUP	-	-	-	-	-	-	-	-
6-5-3	Pembuatan PTPA/PPTPA sesegera mungkin	Gub.	-	-	-	-	-	-	-	-
6-6-1	Pelatihan teknik operasi untuk tenaga kerja pemerintah Balai PSDA	DPUP	45							
6-6-2	Pelatihan pengelolaan dan perencanaan bagi tenaga kerja pemerintah	DPUP	45							
6-6-3	Pelatihan operasi & pemeliharaan sistem irigasi	DPUP	242	242	24					
6-6-4	Pelatihan bersama dengan LSM, tokoh masyarakat dan orang yang dipilih	DPUP	128							

Note: mil: miliar; DPUP: Dinas PU Pengairan Propinsi Sumatera Selatan; Hutan: Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Selatan; Gubernur: Kantor Gubernur Propinsi Sumatera Selatan, BKSDA: Balai KSDA Propinsi Sumatera Selatan; Palembang: Kota Palembang, BPSDA: Balai PSDA Musi

8.3 Evaluasi Program

Evaluasi proyek telah dilakukan untuk program prioritas yang dipilih dari sudut pandang teknikal, ekonomi, keuangan dan social. Seluruh prioritas program untuk pengelolaan air secara menyeluruh Daerah Aliran Sungai Musi pada dasarnya ditujukan untuk pengelolaan yang layak daerah aliran sungai, dan hal tersebut dapat dikatakan bahwa program-program ini telah dirumuskan untuk tidak memberikan dampak negatif yang signifikan dalam berbagai aspek. Hasil evaluasi tiap program dirangkum seperti yang ditunjukkan dalam **Laporan Utama (Tabel 8.3.1)**. Evaluasi secara keseluruhan untuk seluruh Rencana Pengelolaan Air Secara Menyeluruh telah dibuat sebagai berikut:

Aspek Tehnikal: Program pembangunan rawa dan irigasi yang berkelanjutan mencakup Pra-F/S, F/S dan D/D untuk pembangunan skala besar, dimana biasanya dilakukan menggunakan konsultan internasional, dan itu diusulkan untuk pelaksanaan dalam cara yang sederhana. Modeling program pengelolaan tata guna air mencakup dibutuhkannya bantuan teknologi tinggi dan teknikal dari Negara maju dengan pengalaman yang banyak dalam modeling pengelolaan air daerah aliran pada wilayah Asia muson. Diharapkan tidak ada masalah teknikal yang nyata pada program-program lainnya.

Aspek Ekonomi: Analisis kuantitatif terhadap penggunaan air hujan di daerah pasang surut telah dilakukan, demikian pula terhadap Program Drainase di Kota Palembang (lihat **Tabel 8.3.1** pada Laporan Utama untuk nilai EIRR, dll.). Manfaat yang diharapkan dari program-program tersebut dapat dilihat dari: peningkatan produksi pangan setelah pelaksanaan program, perbaikan lingkungan hidup, dan pembangunan ekonomi di tingkat provinsi/DAS dari Komponen Kegiatan 1; peningkatan pencegahan banjir dan pemeliharaan rezim sungai dengan biaya murah dari Komponen Kegiatan 2; penghematan biaya pengerukan, peningkatan keanekaragaman hasil pertanian, penghutanan kembali dari Komponen Kegiatan 3; pengurangan kerusakan akibat banjir dan penyakit yang bersumber dari air dari Komponen Kegiatan 4; pemantauan hidrologi dan kualitas air dan pembentukan database dari Komponen kegiatan 5; penghematan biaya komunikasi, pengumpulan data, penggunaan air, dan pengembangan sumberdaya manusia dari Komponen Kegiatan 6. Sebagai hasilnya, beberapa program memberikan dampak ekonomi langsung dan sebagian program lainnya memberikan dampak ekonomi tidak langsung. Dampak ekonomi tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, diperkirakan besar. Evaluasi ekonomi dengan membandingkan manfaat yang diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan akan dilakukan pada tahap pelaksanaan kegiatan.

Aspek Finansial: Evaluasi finansial terhadap program-program dilakukan dari sudut pandang instansi pemerintah yang relevan untuk memastikan kemampuan mereka dalam pelaksanaan program-program tersebut. Kemampuan tersebut diukur dengan membandingkan besarnya anggaran dengan besarnya belanja program tahunan. Sebagai hasilnya, beberapa program dapat dilaksanakan dengan menggunakan dana APBD, dan sebagian program lainnya dengan tambahan dana dari APBN. Untuk dana APBN, tambahan dana dari negara donor dalam bentuk pinjaman atau hibah juga perlu dipertimbangkan.

Aspek Lingkungan dan Sosial: Program diusulkan mempertimbangkan keterlibatan masyarakat pada umumnya, diantisipasi tidak ada dampak negatif sosial yang serius dan diharapkan banyak dampak positif (penguatan solidaritas sosial dari masyarakat daerah, dll.). Konservasi dan rehabilitasi lingkungan merupakan salah satu tujuan dari rencana induk dan diharapkan banyak keuntungan lingkungan (rehabilitasi ekosistem dan biota asli, dll.). Penjaringan dampak awal terhadap lingkungan disajikan pada Laporan Utama.

8.4 Rencana Kegiatan untuk Memulai Pelaksanaan Pengelolaan

8.4.1 Rencana Kegiatan untuk Tiap-Tiap Program Prioritas

Rencana kegiatan untuk kelancaran pelaksanaan dari tiap-tiap program prioritas telah diusulkan seperti yang ditunjukkan dalam **Tabel 8.4.1**.

8.4.2 Kegiatan Utama untuk Memulai Pelaksanaan Pengelolaan

Prioritas program telah dipilih dari tiap-tiap komponen program mempertimbangkan faktor-faktor; prasyarat untuk program-program lainnya, keseriusan dan keperluan pemulaian awal, skala biaya. Program yang dipilih memerlukan pelaksanaan awal. Untuk kelancaran awal pelaksanaan dari rencana pengelolaan, kegiatan utama dianggap penting. Kegiatan utama diidentifikasi sebagai berikut:

Diusulkan bahwa **BAPPEDA** Propinsi Sumatera Selatan akan mengkoordinasikan untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut: (i) Proposal Rencana Pengelolaan Air Secara Menyeluruh harus disahkan pada Rencana Strategi Propinsi Sumatera Selatan tahun 2004-2008 mendatang; dan, (ii) Keputusan Pemerintah Propinsi untuk pelaksanaan rencana induk yang diusulkan harus disiapkan dan digunakan.

Program 1-6: Modeling Pengelolaan Tata Guna Air merupakan salah satu dari kebutuhan program yang sangat mendesak Model merupakan perangkat dasar untuk kelayakan pengelolaan air. Pelaksanaan program membutuhkan bantuan tehnikal dari negara-negara maju dengan pengalaman yang banyak dalam modeling pengelolaan air daerah aliran pada wilayah Asia muson. **Dirjen Sumberdaya Air** diusulkan untuk memulai persiapan untuk TOR bagi bantuan tehnikal.

Data kualitas air dan hidrologi dibutuhkan untuk digunakan dalam Pengelolaan Tata Guna Air seperti yang didiskusikan di atas. Tanpa data ini, model tidak dapat digunakan dengan layak; lalu, dibutuhkan koordinasi yang dekat dengan modeling pengelolaan tata guna air. Hal tersebut diusulkan bahwa Balai PSDA Musi berkoordinasi dengan Dinas PU Pengairan memulai diskusi dengan BMG, BAPEDALDA, PDAM untuk jaringan kerja pemantauan di masa mendatang di daerah aliran dan menyiapkan TOR untuk menghasilkan APBN.

Pengelolaan dataran banjir harus dipertimbangkan sebagai sebuah program jangka panjang selama 50-100 tahun, tetapi hal tersebut harus dimulai sebelum proses pembangunan yang terkendali. Dapat dikatakan bahwa aktivitas **Dinas PU Pengairan** banyak mempengaruhi Daerah Aliran Sungai Musi. Diusulkan untuk merumuskan

sebuah kelompok yang bertanggungjawab di bawah Dinas PU Pengairan dan untuk memulai kegiatan yang dibutuhkan.

Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Selatan dapat memulai kegiatan untuk program konservasi dan rehabilitasi DAS. Pembuatan gugus tugas dan aktivitasnya dianggap mendesak. Juga diusulkan juga untuk memulai diskusi dengan Kimpraswil untuk kesimpulan dari Daerah Aliran Sungai Musi ke dalam “Daftar Prioritas Daerah Aliran Sungai untuk Reboisasi” disiapkan bergabung dengan Menteri Kehutanan dan Kimpraswil.

Dinas PU Pengairan diusulkan untuk mengidentifikasi program yang mencakup WISMP. Hal tersebut harus dilaksanakan secara berkelanjutan untuk kemajuan program pada Daerah Aliran Sungai Musi di bawah WISMP.

8.5 Rangkuman Program untuk Proyek Prioritas

Rangkuman program untuk proyek prioritas seperti dilampirkan sebelum Tabel 8.4.1.

Table 8.4.1 Rencana Kerja Pelaksanaan Prioritas Program

Komponen dan Program		Kegiatan Dimulai			Jangka Waktu Menengah Pemeriksaan	
		Waktu	Kegiatan	Oraganisasi Yang Berwenang	Waktu	Hal Yang Diperiksa
Komponen 1: Pengelolaan Penggunaan Air						
1-2	Pengembangan rawa dan irigasi secara terus-menerus	2004.01	Perumusan badan yang bertanggung jawab di DPUP	DPUP	2004.06	TOR untuk Pre-F/S dipersiapkan
1-3	Pemanfaatan Air Hujan di area rawa pasang-surut	2004.06	Awal perencanaan sumber keuangan	DPUP	2004.12	Sumber keuangan ditentukan
1-4	Pengelolaan budi daya air	2004.06	Penyelesaian survei pengumpulan data	DPUP	2004.09	Pertemuan pertama dilakukan antara WUA pemilik pertanian
1-6	Pembentukan pengelolaan sumber daya air	2004.01	Persiapan TOR	DGWR	2004.09	Rencana pelaksanaan studi ditentukan
Komponen 2: Pengelolaan dataran Banjir						
2-1	Program pengendalian tata guna lahan dan penetapan wilayah	2004.01	Perumusan badan yang bertanggung jawab di DPUP	DPUP	2004.03	Gambar LANDSAT yang Penting dibeli
Komponen 3: Konservasi dan Rehabilitasi Daerah Perairan Sungai						
3-1	Aplikasi hutan pertanian di perkebunan petani	2004.01	Pembentukan tugas yang harus dilakukan	Kehutanan	2005.12	Rencana bentuk proyek dirumuskan
3-3	Penguatan penyuluhan pertanian /perumahan /hutan yang ada	2004.01	Pembentukan satuan tugas yang harus dilakukan	Kehutanan	2004.12	Tempat proyek ditentukan
3-4	Penghijauan hutan produksi	2004.01	Perumusan Badan Investor	Kehutanan	2004.12	Memilih perusahaan pelaksana diajukan
3-6	Koordinasi bagian dalam dan antar DAS	2003.10	Pengesahan susunan PTPA/PPTPA	Gubernur	--	--
3-7	Rehabilitasi hutan lindung yang ada	2004.01	Perumusan badan yang bertanggung jawab di BKSDA	BKSDA	2005.12	Prioritas area ditentukan
Komponen 4: Perbaikan Lingkungan Air Kota						
4-1	Pengelolaan drainase masyarakat	2003.10	Pemilihan LSM yang akan terlibat dalam program	Palembang	2004.01	Sumber keuangan ditentukan
4-3	Rehabilitasi saluran drainase	2003.10	Permintaan Anggaran program	Palembang	2004.01	Sumber keuangan ditentukan
Komponen 5: Pembentukan Jaringan Pemantauan						
5-1	Pembentukan Pemantauan Sistem Hidrologi	2004.04	Pengesahan program yang selesai oleh IWIRIP dan program yang diajukan untuk WISMP	BPSDA	2004.06	Koordinasi antara BPSDA dan BMG pada pertukaran data curah hujan diselesaikan
5-2	Pembentukan Pemantauan Kualitas Air	2004.04	Pengesahan program yang selesai oleh IWIRIP dan program yang diajukan untuk WISMP	BPSDA	2004.06	Koordinasi antara BPSDA dan BAPEDALDA dalam pembatasan pengamatan kualitas air diselesaikan
5-4	Pembuatan Database Hidrologi	2004.01	Penyelesaian program kerja untuk Unit Informasi dan Data Sumber Daya Air	BPSDA	2004.03	Pengoperasian ACCESS database dimulai
Komponen 6: Penguatan Kelembagaan						
6-2-3	Website resmi pengelolaan sumber daya air	2003.10	Perumusan badan yang bertanggung jawab di DPUP	DPUP	2004.09	Masa Percobaan diselesaikan
6-5-1	Pembentukan Unit Informasi dan Data Sumber Daya Air di Balai PSDA	2003.10	Pengesahan susunan Unit Informasi dan Data Sumber Daya Air	DPUP	--	--
6-5-3	Pembentukan PTPA/PPTPA sesegera mungkin	2003.10	Pengesahan susunan PTPA/PPTPA	Gubernur	--	--
6-6-1	Pelatihan teknis pelaksanaan bagi pegawai pemerintahan Balai PSDA	2003.10	Perumusan badan yang bertanggung jawab di DPUP	DPUP	2004.01	Pelatihan dimulai
6-6-2	Pelatihan pengelolaan dan perencanaan untuk pegawai pemerintah terkait					
6-6-3	Pelatihan operasi dan pemeliharaan sistem irigasi					
6-6-4	Pelatihan bersama dengan LSM dengan tokoh masyarakat dan orang yang dipilih					

Catatan: mil: miliar; DPUP: Dinas PU Pengairan Propinsi Sumatera Selatan; Forest: Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Selatan; Gubernur: Kegubeneran Propinsi Sumatera Selatan, BKSDA: Balai KSDA Propinsi Sumatera Selatan; Palemb.: Kota Palembang, BPSDA: Balai PSDA Musi